

## PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2025

Oleh:

**Olivia Damayanti Marpaung<sup>1</sup>**

**Joko Suharianto<sup>2</sup>**

Universitas Negeri Medan

Alamat: JL. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten  
Deli Serdang, Sumatera Utara (20371).

Korespondensi Penulis: [oliviamarpaung05@gmail.com](mailto:oliviamarpaung05@gmail.com), [djoko@unimed.ac.id](mailto:djoko@unimed.ac.id).

**Abstract.** *Poverty is one of the main issues in economic development in Indonesia. Although various policies have been implemented by the government, the level of poverty remains a challenge that must be addressed continuously. Poverty is not only related to low income levels but also involves limited access to education, healthcare, and employment opportunities. One of the policies aimed at improving workers' welfare is the determination of minimum wages and government expenditure. However, in several periods, minimum wages, government spending, and poverty levels have not shown consistent results. The data used in this study are secondary time series data from 2015 to 2025 obtained from BPS Indonesia. This study aims to examine the effect of minimum wages on poverty; the effect of government expenditure on poverty; and simultaneously, the effect of minimum wages and government expenditure on poverty. The analytical technique used in this research is simple linear regression, with classical assumption tests including normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test. All data processing in this study was conducted using EViews 13.*

**Keywords:** *Poverty, Minimum Wage, and Government Expenditure.*

**Abstrak.** Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan yang harus diatasi secara berkelanjutan.

Received February 13, 2026; Revised March 08, 2026; April 02, 2026

\*Corresponding author: [oliviamarpaung05@gmail.com](mailto:oliviamarpaung05@gmail.com)

## **PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2025**

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Salah satu kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja adalah penetapan upah minimum dan pengeluaran pemerintah. Namun dalam beberapa periode upah minimum, pengeluaran negara dan tingkat kemiskinan tidak menunjukkan hasil konsisten. Data penelitian berupa data sekunder time series 2015-2025 yang diperoleh dari BPS Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan; pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan; secara simultan pengaruh upah minimum dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana, dengan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Seluruh pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu Eviews 13.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Upah Minimum, dan Pengeluaran Pemerintah.

### **LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara besar yang sedang berkembang sehingga banyak masalah-masalah yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, salah satunya yaitu Kemiskinan. Masalah-masalah kemiskinan bukan hanya dialami oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, tetapi masalah ini juga pernah dialami oleh negara-negara maju. Contoh negara Singapura dan negara Inggris. Singapura tercatat sebagai negara miskin, rawa-rawa, dan minim sumber daya alam, terutama pada masa awal kemerdekaannya dari Malaysia, yaitu sekitar 9 Agustus 1965 hingga akhir 1960-an. Singapura berhasil mengubah statusnya dari Third World (dunia ketiga) menjadi First World (negara maju) dalam waktu yang relatif singkat. Inggris pernah mengalami kemiskinan-nasional di penghujung tahun 1700an pada era kebangkitan revolusi industri di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani.

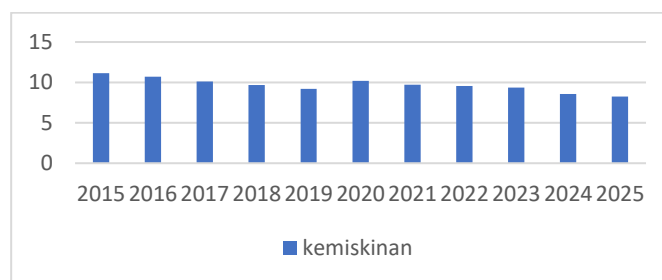
Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan

yang layak. Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan. Menurut definisi apapun, kemiskinan absolut terjadi ketika sebagian besar penduduk tidak memiliki akses terhadap kebutuhan paling mendasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sedangkan kemiskinan relatif disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi yang berkontribusi terhadap kesenjangan (Masyarakat, 2023).

Kemiskinan tidak hanya soal uang, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan layak, dan kesempatan kerja. Di Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik) mengukur kemiskinan dengan garis kemiskinan, yaitu level pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan layak. Seseorang atau keluarga dianggap hidup dalam kemiskinan jika tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kebutuhan dasar lainnya. Mereka yang berpenghasilan kurang dari jumlah tertentu, yang disebut garis kemiskinan, dianggap miskin (BPS, 2022).

Negara-negara termiskin di dunia pada tahun 2025-2026, berdasarkan PDB per kapita dan tingkat kemiskinan, didominasi oleh negara-negara Afrika seperti Sudan Selatan, Burundi, dan Republik Afrika Tengah. Sudan Selatan sering menempati urutan pertama akibat konflik berkepanjangan, infrastruktur minim, dan kekeringan, dengan kemiskinan ekstrem yang berdampak luas. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun 2015 hingga 2025. Penurunan kemiskinan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan terbesar tercatat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Jawa masih memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak secara absolut, yakni sekitar 12,56 juta orang (52,66% dari total nasional).

**Gambar 1. Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015 - 2025**



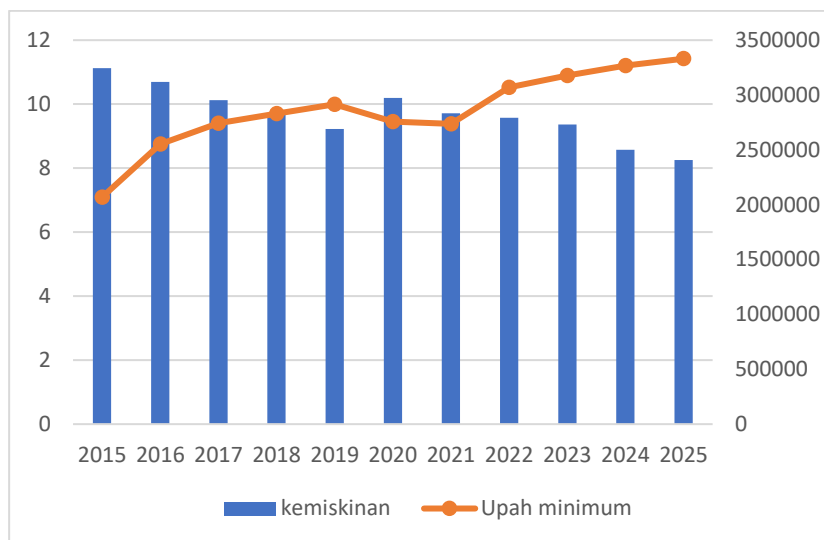
## **PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2025**

Dari gambar 1. bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah penduduk miskin berkurang dari 11,13% hingga 8,25% jumlah penduduk miskin di Indonesia relatif menurun karena kombinasi pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan perluasan program bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran. Penurunan ini juga didukung oleh upaya peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang membantu meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi kelompok rentan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat karena dampak besar dari pandemi COVID-19 yang mengguncang perekonomian dan masyarakat secara luas. BPS mencatat persentase penduduk miskin naik dari sekitar 9,22% pada tahun 2019 hingga 10,19% pada tahun 2020.

Dalam upaya mengurangi kemiskinan, Upah minimum meningkatkan pendapatan pekerja berupah rendah, sehingga rumah tangga mereka bisa melewati garis kemiskinan melalui daya beli lebih baik untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan Pendidikan. teori ekonomi, menjelaskan upah minimum berfungsi sebagai "harga lantai" (floor price) yang melindungi pekerja dari upah di bawah tingkat subsisten, sebagaimana dijelaskan dalam teori upah marginal produktivitas dan teori tawar-menawar. (Sukirno, 2013), upah minimum adalah imbalan jasa berupa uang atau barang yang diterima pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan.

Menurut teori upah subsisten (subsistence theory) dari David Ricardo, upah minimum menjaga pendapatan pekerja di atas tingkat kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mencegah populasi miskin bertambah melalui efek pendapatan positif. Teori efisiensi upah (efficiency wage theory) Leibenstein menambahkan bahwa upah lebih tinggi meningkatkan produktivitas dan nutrisi pekerja, yang secara tidak langsung menurunkan kemiskinan dengan mengurangi turnover dan absensi. Namun, teori pasar tenaga kerja neoklasik (misalnya model Stigler) memperingatkan bahwa upah minimum di atas ekuilibrium menyebabkan pengangguran surplus, terutama pada pekerja tidak terampil, yang justru memperburuk kemiskinan.

### **Gambar 2. Perkembangan Upah Minimum dan Penduduk miskin di Indonesia Tahun 2015-2025**



Berdasarkan Gambar 1.2. di atas diketahui bahwa upah minimum cenderung meningkat setiap tahunnya dari 2015 hingga 2019. Tetapi di tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan disebabkan oleh covid-19 yang dimana banyak perusaahann yang mengalami kerugian dan pemerintah melalui Kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia menetapkan kebijakan agar upah tidak dinaikkan untuk mencegah PHK massal. Kemudia meningkat hingga tahun 2025 karena Upah minimum (UMP/UMK) di Indonesia naik dari 2022 hingga 2025 terutama untuk menyesuaikan daya beli pekerja terhadap inflasi harga kebutuhan pokok, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan merespons pertumbuhan ekonomi, sesuai formulasi pemerintah. Kenaikan ini juga didorong oleh kenaikan biaya hidup, penyesuaian regulasi tenaga kerja, dan keseimbangan daya saing.

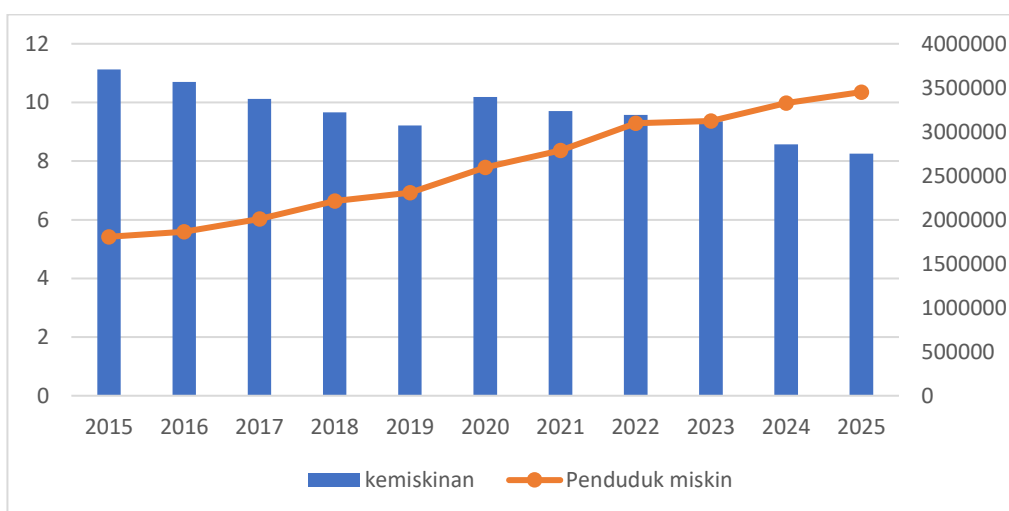
Ternyata selain permasalahan kesenjangan data dengan arah teori, ada permasalahan pendukung lainnya, yakni *gap research* antara upah minimum dengan kemiskinan. Upah minimum didapatkan koefisien negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. (Nabila et al., 2025), upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. (Munarni, 2024), upah minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia, namun tidak signifikan (Millenia & Zaini, 2021). upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh (Balqis et al., 2025). upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Kota Makassar (Minimum et al., 2021).

Selain upah minimum, Dalam upaya mengurangi kemiskinan, pemerintah memiliki peran penting melalui kebijakan fiskal, salah satunya pengeluaran pemerintah.

## **PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2025**

Teori Keynes (1936): Keynes menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah (belanja sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan) dapat meningkatkan permintaan agregat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja, sehingga berpotensi menurunkan angka kemiskinan. Pengeluaran ini mencerminkan kebijakan pemerintah dan terlihat dalam dokumen APBN/APBD, termasuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, dan pembayaran bunga utang. Belanja hibah dan bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Pengeluaran pemerintah dapat berdampak berbeda terhadap kemiskinan. Di satu sisi, penelitian menunjukkan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial, serta belanja modal untuk infrastruktur dan pendidikan, cenderung menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Namun, di sisi lain, pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran, seperti belanja modal yang mangkrak atau subsidi yang tidak terfokus pada masyarakat miskin, dapat mengakibatkan anggaran besar tetapi tidak diikuti penurunan kemiskinan yang berarti.

**Gambar 3. Perkembangan pengeluaran pemerintah dan Penduduk miskin di Indonesia Tahun 2015-2025**



Berdasarkan Gambar 1.2. di atas, Tahun 2020 pengeluaran pemerintah bertambah dari 2.786.411,4 miliar hingga 3.096.262,7 miliar di tahun 2022. Pengeluaran pemerintah yang meningkat disebabkan oleh covid-19 justru menambah penduduk miskin. Ditahun 2021 pengeluaran pemerintah dengan penduduk miskin setara. Dengan menambah jumlah pengeluaran mengurangi jumlah kemiskinan. Pada tahun 2023

pengeluaran pemerintah menggurang menjadi 3.123.677,3 miliar. Kemudian meningkat lagi hingga tahun 2025 sebesar 3.451.400.

Ternyata selain permasalahan kesenjangan data dengan arah teori, ada permasalahan pendukung lainnya, yakni *gap research* antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur berpengaruh signifikan dengan arah hubungan yang negative (Djohan, 2019). Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Dan & Terhadap, 2022). pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali (Romi & Umiyati, 2018), (Dan & Terhadap, 2022). belanja publik memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan Indonesia dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia (Millenia & Zaini, 2021). pengeluaran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat (Panggabean et al., 2019). pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (Nasution, 2023). Berdasarkan uraian kesenjangan *gap data* dan *gap research* antara upah minimum dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskina. Tentunya hal ini semua menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap dan mengkaji lebih jauh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini disajikan, dijelaskan, dan diinterpretasikan dalam bentuk angka. Fokus dari penelitian ini adalah masalah kemiskinan di Indonesia. Variabel yang diteliti meliputi upah minimum dan pengeluaran pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data yang digunakan adalah data deret waktu selama periode 11 tahun, mulai dari tahun 2015 hingga 2025. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Sebagai uji asumsi, penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Penelitian ini juga mengkaji pengaruh secara parsial, pengaruh secara simultan, dan koefisien determinasi. Semua

# PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2025

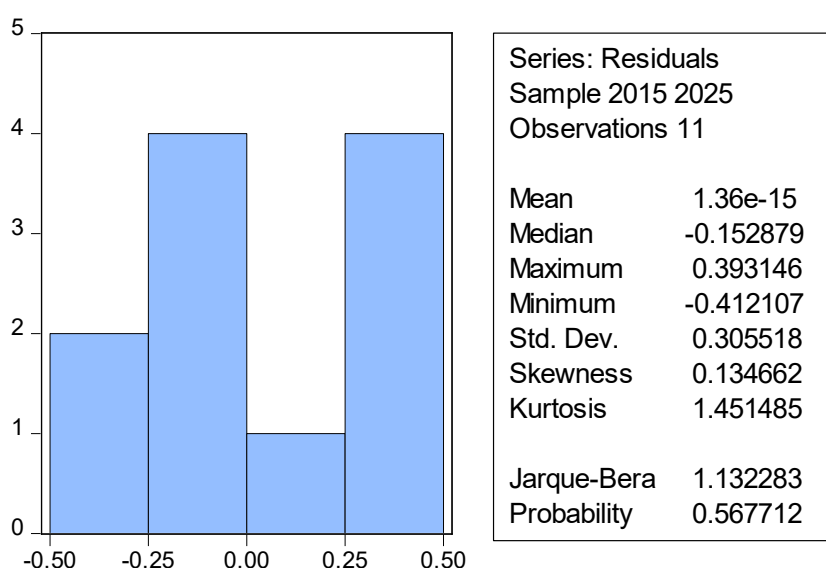
pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat analisis Eviews 13.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

**Gambar 4. Hasil Uji Normalitas**



Kriteria nilai Prob. Jacque Bera (JB)  $> 0,05$  artinya  $H_0$  diterima, berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi normalitas atau pengganggu/residual terdistribusi secara normal. Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa Prob. Jarque Bera sebesar 0,567712  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji normalitas

#### 2. Uji Multikoelineritas

**Gambar 5. Hasil Uji Multikoelineritas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.048563	98.85637	NA
UP	3.63E-13	284.1099	4.039559
PP	1.32E-13	88.23860	4.039559

Hasil uji Variance Inflation Factors dengan kriteria jika nilai Centered VIF  $< 10$ , maka  $H_0$  diterima artinya tidak terjadi pelanggaran uji multikoelineritas. Berdasarkan

gambar di atas diketahui bahwa nilai Centered VIF sebesar  $4.039559 < 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji multikoelineritas

### 3. Uji Autokorelasi

**Gambar 6. Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.577997	Prob. F(2,6)	0.5894
Obs*R-squared	1.776964	Prob. Chi-Square(2)	0.4113

Hasil Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan kriteria jika nilai prob.  $Obs*R-squared > 0.05$ ,  $H_0$  diterima artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa Prob. sebesar  $0,4113 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji autokorelasi.

### 4. Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.850256	Prob. F(2,8)	0.4626
Obs*R-squared	1.928314	Prob. Chi-Square(2)	0.3813
Scaled explained SS	0.230242	Prob. Chi-Square(2)	0.8913

Hasil Breusch Pagan-Godfrey: Heteroskedasticity Test dengan kriteria jika nilai Prob.  $Obs*R squared > 0.05$ ,  $H_0$  diterima artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa Prob. sebesar  $0,3813 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Hipotesis

**Gambar 8. Hasil Uji Hipotesis**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.64950	1.023993	15.28281	0.0000
UP	-1.91E-06	6.03E-07	-3.165932	0.0133
PP	-1.97E-07	3.64E-07	-0.542625	0.6022
R-squared	0.870378	Mean dependent var		9.680000
Adjusted R-squared	0.837972	S.D. dependent var		0.848587
S.E. of regression	0.341579	Akaike info criterion		0.916525
Sum squared resid	0.933410	Schwarz criterion		1.025042
Log likelihood	-2.040890	Hannan-Quinn criter.		0.848121
F-statistic	26.85890	Durbin-Watson stat		1.991403
Prob(F-statistic)	0.000282			

# **PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2025**

## **1. Uji Parsial**

- a. Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan prob. Sebesar  $0.0133 < 0.05$ , maka  $H_a$  diterima
- b. pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan Prob. Sebesar  $0.6022 < 0.05$ , maka  $H_0$  diterima

## **2. Uji Simultan**

Secara simultan variabel Upah minimum dan Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan Prob, sebesar  $0,000282 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima.

## **3. Koefisien Determinasi (R-Square)**

Dari hasil regresi di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0.870378 atau 87,03%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel bebas penelitian ini yaitu Upah Minimum ( $X_1$ ) dan Pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2025 sebesar 87,03%. Sisanya 12,97% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## **Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan**

Hasil uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai probabilitas  $0,0133 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa kenaikan upah minimum dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Secara teori, peningkatan upah minimum akan meningkatkan pendapatan pekerja berpenghasilan rendah sehingga daya beli masyarakat meningkat dan kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Kondisi ini mendorong masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Selain itu, upah minimum juga berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Sari et al., 2021) yang menunjukkan bahwa adanya ketentuan nilai upah minimum ini jumlahnya harus di atas kebutuhan hidup layak masyarakat yang artinya bahwa adanya kenaikan upah tidak akan berarti jika angka kebutuhan hidup layak masih berkisar di atas jumlah upah minimum.

Data dari Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum di Indonesia cenderung diikuti penurunan tingkat kemiskinan. Tetapi arah ini berlawanan dengan (Wage et al., 2024) upah minimum memiliki pengaruh negatif namun

tidak signifikan terhadap penduduk miskin. Dengan kata lain, upah minimum belum tentu dapat meminimalisir masalah kemiskinan. Upah minimum belum sepenuhnya menciptakan kesejahteraan bagi Masyarakat karena kenaikan upah minimum yang terjadi setiap tahunnya juga tidak sepadan dengan kenaikan inflasi di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi upah minimum, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Karena kenaikan upah di Indonesia dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

### **Pengaruh Pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan**

Hasil uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai probabilitas  $0,6022 > 0,05$ . Artinya, peningkatan pengeluaran pemerintah cenderung menurunkan kemiskinan, tetapi pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik. Secara teori, pengeluaran pemerintah melalui belanja sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Panggabean et al., 2019). Pengeluaran pemerintah daerah memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai probabilitas sekitar  $0,7091 > 0,05$ . Pengaruh yang tidak signifikan ini bisa disebabkan dari pemanfaatan dana untuk membiayai proyek-proyek perumahan dan fasilitas umum tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, seperti pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana jalan. Ketidaksignifikanan hasil ini disebabkan oleh kurang efektifnya penyaluran anggaran, dominasi belanja rutin, serta dampak yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah berpotensi menurunkan kemiskinan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengelolaannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2015–2025. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan pengeluaran pemerintah menunjukkan hubungan negatif namun tidak

## **PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2025**

signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, meskipun secara teori peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mengurangi kemiskinan, dalam penelitian ini dampaknya belum terlihat secara kuat. Secara bersama-sama, upah minimum dan pengeluaran pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki peran dalam menjelaskan perubahan kemiskinan. Nilai koefisien determinasi sebesar 87,03% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah diharapkan dapat menetapkan kebijakan upah minimum yang lebih memperhatikan standar kebutuhan hidup layak agar dampaknya terhadap penurunan kemiskinan lebih optimal. Pengalokasian pengeluaran pemerintah perlu difokuskan pada sektor yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, agar lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan. Perlu adanya peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran agar program-program pemerintah dapat tepat sasaran. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi agar analisis yang dihasilkan lebih menyeluruh.

## DAFTAR REFERENSI

- Balqis, M., Sinaga, N. Q., & Hanum, N. (2025). *Pengaruh Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh*.
- Dan, E., & Terhadap, P. (2022). *Pengaruh pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan*. 2(6), 127–140.
- Djohan, S. (2019). *Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi kalimantan timur Effect of government spending on education and health infrastructure on economic growth in east kalimantan province*. 21(2), 211–216.
- Kaluge, D. (n.d.). *No Title*.
- Masyarakat, F. P. (2023). *No Title*. 5(2), 87–103.
- Millenia, E., & Zaini, D. (2021). *Ecosains : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan Pengaruh Upah Minimum , Tingkat Pengangguran Terbuka , Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di*. 10(November), 106–114.
- Minimum, U., Pengeluaran, D. A. N., Kapita, P. E. R., Di, K., & Makassar, K. (2021). *MENGUKUR DAMPAK PENGANGGURAN , TINGKAT PENDIDIKAN , . 1*, 1–12.
- Munarni, V. (2024). *PROVINSI SULAWESI TENGGARA Corresponding Author : Vivi Munarni 301 Corresponding Author : Vivi Munarni 302*. 9(2012), 301–312.
- Nabila, Z., Balqis, P., & Nurhadi, B. (2025). *Dampak jumlah penduduk , upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan : Peran ZIS sebagai variabel moderasi di Jawa Tengah*. 5(1), 61–72.
- Nasution, R. A. (2023). *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah , Pengangguran Dan Inflasi*.
- Panggabean, M., Ria, E., & Matondang, L. (2019). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah , Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) , dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017*. 154–164.
- Parepare, K., & Selatan, S. (2018). *Pengaruh pengeluaran pemerintah padabidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap kemiskinan di wilayah ajatappareng*. 1, 39–48.

## **PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2025**

- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi*. 7(1), 1–7.
- Sari, Y. A., Studi, P., Pembangunan, E., & Ekonomi, F. (2021). *PENGARUH UPAH MINIMUM TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA JAWA TENGAH*. 10(2), 121–130.
- Struktur, A., Pemerintah, B., Terhadap, D., Di, K., & Timur, K. (2024). *Oikos-Nomos Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*. 17(2).
- Utami, I. T., & Rofiuddin, M. (2022). *Analisis pengaruh upah minimum , belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi mayoritas muslim*. 2(3), 145–160.
- Wage, P. M., Expenditures, G., People, P., Minimum, U., Pemerintah, P., & Miskin, J. P. (2024). *No Title*. 6(2), 552–563.